

Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Infrastruktur Pendidikan di MAN 1 Pangandaran

Mutiara Anjani

STITNU Al-Farabi Pangandaran; mutiaraanjani34@gmail.com

Excellent :

Journal Of Islamic Studies

Vol 2 No 1, May 2025

Hal : 135-147

Received: 10 May 2025

Accepted: 25 May 2025

Published: 31 May 2025

Publisher's Note: Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Abstract :

This study aims to identify the types of education financing received by MAN 1 Pangandaran and analyze its impact on the development of educational infrastructure. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study show that education financing at MAN 1 Pangandaran consists of government funds (DIPA and BOS), community contributions through school committees, and assistance from external parties such as CSR and alumni. Each type of financing has a different role in supporting the construction and maintenance of educational facilities. Government funds are the main source of classroom and laboratory construction, while public funds are more flexible in supporting urgent maintenance of facilities. However, infrastructure such as toilets, UKS rooms, and sports fields are still not optimal due to limited fund allocation and delays in budget disbursement. Other challenges faced include long-term planning that has not been maximized and the mismatch between the needs of facilities and the amount of funds available. This study concludes that transparent, collaborative, and needs-based financing management is essential in creating an educational environment that supports the teaching and learning process as a whole.

Keywords : Education Financing, Infrastructure, BOS Funds, Community Participation, Madrasahs.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang diterima oleh MAN 1 Pangandaran serta menganalisis dampaknya terhadap pengembangan infrastruktur pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di MAN 1 Pangandaran terdiri dari dana pemerintah (DIPA dan BOS), kontribusi masyarakat melalui komite sekolah, serta bantuan dari pihak eksternal seperti CSR dan alumni. Setiap jenis pembiayaan memiliki peran berbeda dalam menunjang pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Dana pemerintah menjadi sumber utama pembangunan ruang kelas dan laboratorium, sedangkan dana masyarakat lebih fleksibel dalam mendukung perawatan sarana yang mendesak. Namun demikian, infrastruktur seperti toilet, ruang UKS, dan lapangan olahraga masih belum optimal karena keterbatasan alokasi dana dan keterlambatan pencairan anggaran. Tantangan lain yang dihadapi meliputi

perencanaan jangka panjang yang belum maksimal serta ketidaksesuaian antara kebutuhan fasilitas dan jumlah dana yang tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang transparan, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan riil sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar secara menyeluruh.

Kata Kunci : *Pembiayaan Pendidikan, Infrastruktur, Dana BOS, Partisipasi Masyarakat, Madrasah.*

Pendahuluan

Pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Peran pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai sosial, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Kualitas pendidikan yang baik akan mendorong lahirnya individu-individu yang produktif, kreatif, serta mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat(Indy, 2019).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk hidup di masyarakat(Undang Undang Republik Indonesia, 2003). Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dan hal ini sangat bergantung pada dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

Pembiayaan pendidikan mencakup perolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana dalam mendukung seluruh kegiatan pendidikan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah. Aspek pembiayaan dalam pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kontribusi masyarakat(Arifah, 2018). Setiap jenis pembiayaan ini memiliki peranan yang berbeda dalam mendukung berbagai kebutuhan sekolah, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas sanitasi.

MAN 1 Pangandaran sebagai salah satu lembaga pendidikan negeri berbasis keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama menghadapi tantangan dalam pemenuhan infrastruktur pendidikan. Meskipun sekolah ini mendapatkan bantuan rutin dari dana BOS serta dukungan dari pemerintah pusat, kebutuhan terhadap fasilitas fisik yang memadai belum sepenuhnya terpenuhi. Ketergantungan pada dana tertentu saja sering kali membuat upaya pengembangan infrastruktur terhambat, terlebih ketika tidak diimbangi dengan kontribusi dari pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat yang memadai.

Secara teoritis, pembiayaan pendidikan dapat dikaji melalui perspektif Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang dikembangkan oleh Gary Becker. Dalam teori ini, pendidikan dianggap sebagai investasi yang dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan potensi ekonomi individu (Adriani, 2019). Oleh karena itu, pembiayaan yang dialokasikan untuk pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur, merupakan bentuk investasi jangka panjang yang strategis, bukan sekadar pengeluaran. Selain itu, teori Good Governance dalam sektor pendidikan (UNDP, 1997) juga menjadi kerangka penting yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan (Iswahyudi, Triuwono, & Achsin, 2017). Dengan tata kelola pembiayaan yang baik, dana yang diterima oleh sekolah dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan pendidikan.

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Daris Susanto & Alfi Maulia Rahma (2023), bahwa pembiayaan pendidikan mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara kegiatan pendidikan (Susanto & Rahma, 2023). Studi oleh Almasdi Syahza dan Suarman (2013) menyoroti bahwa sekolah-sekolah di daerah tertinggal cenderung mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur karena tidak semua jenis pembiayaan tersedia atau dikelola dengan optimal.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai jenis-jenis pembiayaan yang diterima MAN 1 Pangandaran dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi infrastruktur sekolah. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan serta implikasinya bagi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang diterima oleh MAN 1 Pangandaran dan dampaknya terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di sekolah tersebut. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan data dalam bentuk narasi dan analisis yang memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti dalam konteks alami (Sugiyono, 2019). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Pangandaran, yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Jl. Raya Cijulang No. 234, Sukaresik. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan April 2025. Subjek penelitian terdiri dari bendahara sekolah yang berperan penting dalam mengelola anggaran dan dana pendidikan di sekolah tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi panduan wawancara, lembar observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan pengalokasian dan penggunaan dana pendidikan. Sementara itu, observasi langsung dilakukan untuk menilai kondisi infrastruktur sekolah yang mencakup ruang kelas, laboratorium, fasilitas sanitasi, dan fasilitas penunjang lainnya. Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen penting terkait dengan alokasi anggaran dan pelaksanaan Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah (RAKM).

Agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik mengacu pada penggunaan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, seperti bendahara sekolah, kepala madrasah, staf pengelola infrastruktur, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan dan dampaknya terhadap pengembangan infrastruktur pendidikan di MAN 1 Pangandaran.

Hasil dan Pembahasan

Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan di MAN 1 Pangandaran

Pembiayaan pendidikan di MAN 1 Pangandaran terdiri dari berbagai jenis yang mencerminkan kebutuhan operasional maupun pengembangan lembaga pendidikan. Secara umum, pembiayaan ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:

1. Biaya Langsung (*Direct Cost*) dan Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*)
 - a. Biaya Langsung adalah biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dengan suatu aktivitas, produk, atau proyek tertentu, seperti bahan baku atau upah tenaga kerja langsung. Biaya langsung di MAN 1 Pangandaran mencakup alokasi dana yang secara langsung menunjang proses belajar-mengajar. Contohnya meliputi pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan, pengadaan alat tulis kantor (ATK), pembelian buku pelajaran, serta pengeluaran untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diterima madrasah sebagian besar dialokasikan ke pos-pos ini.
 - b. Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang tidak bisa dikaitkan secara langsung ke satu produk atau aktivitas, melainkan dialokasikan, seperti biaya listrik untuk seluruh gedung atau gaji manajer umum. Biaya tidak langsung, meskipun tidak terlihat secara eksplisit dalam laporan keuangan madrasah, tetap berperan dalam keberlangsungan pendidikan. Contohnya termasuk pengeluaran pribadi siswa seperti biaya transportasi dan konsumsi, serta biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang dikeluarkan oleh keluarga siswa ketika mereka bersekolah dan tidak bekerja. Selain itu, beban operasional gedung seperti penyusutan peralatan dan bangunan termasuk ke dalam jenis biaya ini.
2. Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (*Recurrent and Capital Cost*)
 - a. Biaya Rutin (*Recurrent Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan secara berkala untuk operasional sehari-hari, seperti gaji pegawai, biaya perawatan, atau alat habis pakai. Biaya rutin di MAN 1 Pangandaran mencakup semua pengeluaran yang berulang setiap tahun ajaran, seperti gaji dan tunjangan guru, biaya operasional kantor, perawatan fasilitas madrasah, serta program tahunan seperti ujian, pelatihan guru, dan kegiatan keagamaan. Pendanaan untuk biaya ini umumnya bersumber dari dana BOS dan sebagian dari bantuan Kementerian Agama.

- b. Biaya Pembangunan (Capital Cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi jangka panjang atau pengadaan aset tetap, seperti pembelian mesin, pembangunan gedung, atau infrastruktur lainnya. Biaya pembangunan di MAN 1 Pangandaran berfokus pada pengembangan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru, renovasi toilet siswa, pengadaan peralatan laboratorium, dan pembangunan ruang perpustakaan. Pembiayaan jenis ini biasanya bersifat insidental dan berasal dari program bantuan khusus pemerintah pusat atau daerah, serta kontribusi masyarakat melalui komite madrasah.
3. Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (Private and Social Cost)
 - a. Biaya Pribadi (Private Cost) adalah biaya yang ditanggung oleh individu atau perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi, seperti ongkos produksi atau biaya transportasi pribadi. Biaya pribadi mencakup sumbangan yang dibayarkan oleh orang tua siswa secara langsung, misalnya iuran komite untuk pembangunan sarana, pengadaan seragam sekolah, dan biaya kegiatan tambahan di luar yang dibiayai oleh BOS. Meskipun MAN 1 Pangandaran merupakan sekolah negeri, tetap terdapat bentuk kontribusi dari keluarga peserta didik.
 - b. Biaya masyarakat adalah pembiayaan yang ditanggung oleh negara atau pemerintah daerah dan digunakan untuk menunjang layanan pendidikan publik. Di MAN 1 Pangandaran, BOS reguler, BOS Kinerja, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan contoh nyata dari biaya masyarakat yang membantu sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas dan pembangunan fasilitas.
4. Biaya Uang (Monetary Cost) dan Biaya Non-Uang (Non-Monetary Cost)
 - a. Monetary cost mencakup semua bentuk pembiayaan yang melibatkan uang tunai. Di MAN 1 Pangandaran, hal ini terlihat dari penggunaan anggaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran honor, serta pengeluaran untuk kegiatan siswa seperti lomba dan pelatihan.
 - b. Biaya Non-Uang (Non-Monetary Cost) adalah pengorbanan yang tidak diukur dalam bentuk uang, seperti waktu yang terbuang, stres, atau ketidaknyamanan. Non-monetary cost mencakup kontribusi tenaga, waktu, dan pikiran dari guru, staf, maupun masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Contohnya, guru yang mengajar di luar jam pelajaran tanpa tambahan honorarium, orang tua yang bergotong-royong dalam pembangunan madrasah, atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan di sekolah.

Klasifikasi pembiayaan ini tidak hanya membantu dalam memahami sumber dan jenis biaya pendidikan, tetapi juga memberikan landasan untuk mengevaluasi bagaimana pembiayaan tersebut berdampak terhadap kualitas dan ketersediaan infrastruktur di MAN 1 Pangandaran. Selanjutnya, pemetaan jenis pembiayaan ini akan menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas pengelolaan dana serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu.

Pengaruh Jenis Pembiayaan terhadap Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan memegang peran penting dalam menunjang kualitas proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar (Dila, Baihaqi, Habibah, & Marini, 2024). Di MAN 1 Pangandaran, terdapat tiga sumber utama pembiayaan pendidikan yang berperan langsung terhadap pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, yaitu dana DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan dana Komite Sekolah. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap aspek infrastruktur, baik dari sisi pembangunan, pemeliharaan, maupun pengembangan fasilitas penunjang.

1. Pembiayaan Pemerintah

Pembiayaan yang berasal dari pemerintah, khususnya melalui dana DIPA dan dana BOS, memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dasar di MAN 1 Pangandaran. Dana DIPA yang bersumber dari Kementerian Agama umumnya dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti ruang kelas baru, rehabilitasi gedung lama, pembangunan laboratorium IPA dan komputer, serta penyediaan sarana pendukung seperti mebel dan perangkat teknologi pendidikan. Dana BOS, meskipun utamanya diperuntukkan bagi operasional harian madrasah, juga dapat digunakan untuk pemeliharaan ringan fasilitas pendidikan seperti perbaikan plafon kelas, pengecatan ulang ruang belajar, atau pembelian kipas angin dan lampu ruang kelas. Dampak pembiayaan pemerintah ini sangat nyata terlihat pada ketersediaan ruang

belajar yang layak, fasilitas laboratorium yang menunjang praktik pembelajaran, serta penataan lingkungan sekolah yang kondusif bagi kegiatan pendidikan.

2. Pembiayaan Masyarakat

Pembiayaan dari masyarakat yang dikumpulkan melalui Komite Sekolah lebih bersifat partisipatif dan fleksibel. Dana ini biasanya digunakan untuk perawatan fasilitas yang tidak tercakup dalam dana BOS, seperti perbaikan atap bocor, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pengecatan dinding luar kelas, atau penambahan perangkat pembelajaran seperti proyektor dan speaker. Selain itu, dana dari komite juga sering digunakan untuk mendukung kegiatan kebersihan dan penataan lingkungan sekolah agar tetap nyaman dan aman bagi siswa. Meskipun nominalnya tidak sebesar dana pemerintah, kontribusi masyarakat ini sangat penting karena dapat diakses lebih cepat dan diarahkan langsung pada kebutuhan prioritas yang muncul secara mendesak. Dalam jangka panjang, keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan juga membangun rasa memiliki terhadap madrasah dan memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas (Marjuki, 2023).

3. Pembiayaan dari Sumber Lain

Selain pembiayaan dari pemerintah dan masyarakat, MAN 1 Pangandaran juga terbuka terhadap bantuan dari sumber eksternal seperti program CSR (*Corporate Social Responsibility*), hibah dari alumni, atau kerja sama dengan lembaga donor. Pembiayaan dari sumber ini cenderung bersifat proyek khusus dan menysasar pembangunan fasilitas yang lebih spesifik. Contohnya, pengembangan perpustakaan digital, pembangunan lapangan olahraga, pembuatan taman belajar, atau ruang keterampilan berbasis kejuruan. Meskipun frekuensi penerimaannya tidak rutin, dana dari sumber lain ini sangat membantu madrasah dalam mengembangkan infrastruktur penunjang yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara holistik. Dampaknya terlihat dalam peningkatan fasilitas yang tidak hanya mendukung pembelajaran formal, tetapi juga mendukung kegiatan pengembangan minat, bakat, dan karakter siswa.

Secara keseluruhan, sinergi antara ketiga sumber pembiayaan—dana DIPA, BOS, dan dana Komite telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga dan mengembangkan infrastruktur pendidikan di MAN 1 Pangandaran. Pembiayaan pemerintah berperan sebagai tulang punggung pembangunan, pembiayaan masyarakat

menjaga keberlanjutan dan fleksibilitas, sedangkan pembiayaan dari sumber lain mendorong inovasi serta diversifikasi fasilitas (Ritonga, 2025).

Dalam hal ini, penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk mengelola dana pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."* Ayat ini mengajarkan bahwa dana pendidikan yang dikelola oleh madrasah, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, merupakan amanah yang harus disalurkan secara adil dan tepat sasaran untuk kepentingan peserta didik.

Selain itu, kontribusi masyarakat melalui komite sekolah menjadi bentuk nyata dari semangat kolaborasi dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam QS. Al-Ma'idah: 2, Allah SWT berfirman, *"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."* Ayat ini memberikan dasar spiritual atas pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Keterlibatan aktif orang tua siswa dalam pembiayaan pembangunan ruang kelas, pengadaan peralatan, atau perawatan fasilitas, merupakan bentuk tolong-menolong yang berdampak positif bagi kemajuan madrasah.

Lebih jauh, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan bagian dari upaya memfasilitasi proses menuntut ilmu. Dalam hal ini, sabda Rasulullah SAW menjadi pengingat yang kuat: *"Barang siapa memudahkan jalan bagi orang yang ingin menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."* (HR. Muslim, no. 2699). Hadis ini menegaskan bahwa membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan bukan hanya tugas administratif semata, melainkan juga bagian dari amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di MAN 1 Pangandaran perlu terus meningkatkan transparansi, perencanaan yang matang, serta semangat kolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan berkelanjutan.

Analisis Dampak terhadap Infrastruktur Pendidikan

Alokasi dana yang diterima oleh MAN 1 Pangandaran dari berbagai sumber pembiayaan, seperti DIPA, BOS, dan dana komite, memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi infrastruktur sekolah. Penggunaan dana DIPA misalnya, telah

dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur fisik, seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, dan ruang guru. Sementara dana BOS lebih banyak dialokasikan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan fasilitas rutin, termasuk pengecatan, perbaikan plafon, serta penyediaan alat pembelajaran sederhana. Dengan adanya pembiayaan tersebut, madrasah mampu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan secara fisik, meskipun masih terdapat keterbatasan pada beberapa sektor infrastruktur yang membutuhkan dukungan lebih lanjut.

Meskipun beberapa fasilitas utama seperti ruang kelas dan laboratorium terpelihara dengan baik, masih terdapat bagian lain dari infrastruktur yang membutuhkan perhatian. Fasilitas seperti toilet siswa, area parkir, lapangan olahraga, dan ruang UKS dinilai belum memadai dan belum tersentuh secara optimal oleh pembiayaan yang ada. Perbandingan antara infrastruktur yang terjaga dengan yang mengalami kerusakan atau kekurangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam prioritas perawatan, yang sebagian besar bergantung pada jenis dan jumlah pembiayaan yang tersedia setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun dana yang diterima mampu menopang fasilitas inti, tetapi belum mencakup seluruh kebutuhan sarana pendukung secara menyeluruh.

Dalam konteks efektivitas pembelajaran, infrastruktur yang ada di MAN 1 Pangandaran sebenarnya telah cukup mendukung kegiatan belajar mengajar inti. Ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium sains secara umum mampu menunjang kebutuhan kurikulum. Namun, apabila dilihat dari perspektif pendidikan abad 21 yang menuntut kreativitas, literasi digital, dan pembelajaran kolaboratif, fasilitas yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Ketiadaan ruang terbuka belajar, akses internet yang terbatas, serta minimnya fasilitas pendukung pembelajaran modern menjadi indikator bahwa infrastruktur yang ada belum sepenuhnya optimal dalam mendorong proses belajar yang inovatif dan menyeluruh.

Tantangan dalam Pengelolaan Pembiayaan untuk Infrastruktur Pendidikan

Pengelolaan pembiayaan infrastruktur di MAN 1 Pangandaran masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, salah satunya adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini kerap menghambat proses pelaksanaan program pengembangan infrastruktur yang telah dirancang sebelumnya. Prosedur administrasi yang panjang dan persyaratan yang ketat juga menjadi kendala tersendiri, terutama dalam situasi darurat ketika fasilitas tertentu perlu segera diperbaiki. Dampak

dari keterlambatan ini bisa mengakibatkan molornya proses pembangunan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kenyamanan dan efektivitas pembelajaran siswa.

Selain masalah pencairan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan jumlah dana yang diterima oleh madrasah. Dalam beberapa kasus, dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan kebutuhan infrastruktur yang ada, khususnya untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan aula, laboratorium tambahan, atau renovasi gedung tua. Ketidaksesuaian ini membuat pihak sekolah harus melakukan seleksi prioritas yang ketat, sehingga banyak kebutuhan infrastruktur yang harus ditunda atau bahkan diabaikan. Akibatnya, pertumbuhan dan perbaikan fasilitas pendidikan berjalan lambat dan tidak merata di seluruh aspek.

Terakhir, tantangan yang muncul dalam perencanaan dan pengelolaan pembiayaan jangka panjang juga menjadi perhatian utama. Selama ini, pengelolaan dana lebih bersifat tahunan dan belum sepenuhnya berbasis pada rencana strategis jangka panjang. Hal ini menyulitkan sekolah untuk melakukan pengembangan infrastruktur secara berkelanjutan. Kurangnya pelatihan dalam perencanaan anggaran dan manajemen keuangan pendidikan di tingkat madrasah juga menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana yang tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas manajerial serta dukungan sistem yang lebih responsif agar tantangan ini dapat diatasi secara sistematis dan berkelanjutan (Andriyan & Yoenanto, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di MAN 1 Pangandaran, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan memainkan peran krusial dalam mendukung kelangsungan serta pengembangan infrastruktur pendidikan. Jenis-jenis pembiayaan yang diterima oleh madrasah, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, rutin maupun pembangunan, serta berasal dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak ketiga, telah memberikan kontribusi nyata terhadap operasional dan perbaikan sarana prasarana pendidikan. Dana DIPA dan BOS dari pemerintah menjadi tulang punggung utama pembangunan fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan peralatan belajar, sementara dana dari komite sekolah dan sumber eksternal seperti CSR turut berkontribusi dalam pemeliharaan serta pengadaan fasilitas pendukung pembelajaran. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa

terdapat ketimpangan antara fasilitas yang terawat dan yang masih membutuhkan perbaikan, seperti toilet, ruang UKS, dan lapangan olahraga.

Selain itu, tantangan dalam pengelolaan pembiayaan juga masih menjadi kendala yang cukup signifikan. Keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian antara kebutuhan infrastruktur dan jumlah dana yang tersedia, serta lemahnya perencanaan jangka panjang menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembangunan di madrasah ini. Beberapa sektor fasilitas belum tersentuh secara optimal karena keterbatasan anggaran dan prioritas penggunaan dana yang bersifat tahunan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan, peningkatan kapasitas manajemen, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pengelolaan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, MAN 1 Pangandaran diharapkan mampu membangun lingkungan belajar yang lebih representatif dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang holistik dan bermutu.

Referensi

- Adriani, E. (2019). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 176. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86>
- Andriyan, A., & Yoenanto, N. H. (2022). Optimalisasi penerapan dan pengelolaan manajemen berbasis sekolah: literatur review. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.45011>
- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Dila, A., Baihaqi, F. N., Habibah, S., & Marini, A. (2024). Studi Pustaka tentang Peran Fasilitas Sekolah dalam Mendukung Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.531>
- Indy, R. (2019). Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 12(4).
- Iswahyudi, A., Triuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>

- Marjuki. (2023). Peran Pembiayaan Pendidikan Dalam Mendukung Program Sekolah. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Ritonga, M. (2025). Lembaga Pembiayaan Pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia, 8(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, D., & Rahma, A. M. (2023). Jenis-jenis Pembiayaan untuk Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2).
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.201>
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2003). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Demographic Research*, 49(0).